JIKB Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis
STMIK DHARMAPALA RIAU

(cc) BY-SA
Copyright © 2026 pada penulis
Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis (JIKB)
November-2026, Vol. 17, No.2, hal.84-89
ISSN(P): 2087-3921; ISSN(E): 2598-9715

Kebijakan Alokasi Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Sindangsari

[1]Pebrian, [2]Kasan K Suantha
[1,2]Universitas Teknologi Digital

Jl. Buah Batu No. 26, Bandung, Jawa Barat 40262
Email: pebrian10221070@digitechuniversity.ac.id*, kasansuanta@digitechuniversity.ac.id

Article History:
Diajukan: 20 Juli 2025; Direvisi: 4 Agustus 2025; Accepted: 24 Oktober 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan alokasi Dana Desa di Desa Sindangsari, Kabupaten Bandung, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021. Pemanfaatan dana dinilai berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperbaiki infrastruktur desa, serta mendorong aktivitas ekonomi melalui program padat karya tunai dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alokasi Dana Desa berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, namun transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan Dana Desa perlu didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan partisipasi guna menjamin pemerataan manfaat dan keberlanjutan pembangunan lokal.

Kata kunci: Dana Desa, Kebijakan Alokasi, Kemiskinan, Pemberdayaan, Desa Sindangsari

ABSTRACT

This study analyzes Village Fund allocation policy in Sindangsari Village, Bandung Regency, to evaluate the effectiveness of its implementation in supporting poverty alleviation. It uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document reviews. The findings indicate that Village Fund management complies with Bandung Regent Regulation Number 136 of 2021. The use of the funds is considered successful in expanding community access to basic services, improving village infrastructure, and encouraging economic activity through cash-for-work programs and the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Village Fund allocation has a positive impact on reducing poverty, but transparency and community involvement in decision-making still need to be improved. Village Fund management should be based on the principles of accountability and participation to ensure equitable distribution of benefits and sustainable local development.

Keywords: Village Fund, Allocation Policy, Poverty, Empowerment, Sindangsari Village

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan kompleks yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Desa Sindangsari, yang terletak di Kabupaten Bandung, merupakan contoh wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan akibat terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat desa.

https://doi.org/10.47927/jikb.v17i2.1217
Segala konten dan isi di dalam jurnal disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa secara mandiri guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Dana ini diharapkan menjadi stimulus pembangunan lokal berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021, mekanisme alokasi Dana Desa dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun, efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan juga sangat bergantung pada penerapan prinsip tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di Desa Sindangsari, alokasi Dana Desa dilakukan setiap tahun, namun angka kemiskinan tetap menjadi persoalan signifikan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan alokasi Dana Desa di Desa Sindangsari dengan fokus pada tiga aspek utama: kebijakan pengelolaan Dana Desa, efektivitas Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan, serta persepsi masyarakat terhadap kesejahteraan yang dirasakan dari penggunaan Dana Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Sindangsari?
2. Sejauh mana Dana Desa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di desa tersebut?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kesejahteraan yang dirasakan dari penggunaan Dana Desa?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Sindangsari;
2. Mengevaluasi efektivitas Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan; dan
3. Menilai tingkat kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari pengalokasian Dana Desa.

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur terkait kebijakan publik, khususnya pada aspek fiskal desentralisasi dan pengentasan kemiskinan berbasis desa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemangku kebijakan lainnya dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa secara optimal dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh kondisi nyata terkait pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sindangsari.

2.1 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Sindangsari, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Desember 2024, mulai tanggal 1 hingga 31 Desember 2024 (Tabel 1).

Tabel 1. Jadwal observasi lapangan di Desa Sindangsari

No	Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Observasi awal dan wawancara pengenalan	✓			
2	Analisis laporan alokasi Dana Desa		✓		
3	Observasi partisipatif			✓	
4	Validasi dan diskusi dengan pihak desa				✓

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

2.2 Teknik pengumpulan dan analisis data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Observasi**: penulis melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan di pemerintahan desa dan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.

2. **Wawancara mendalam**: dilakukan terhadap aparat desa, pengelola kegiatan Dana Desa, dan masyarakat penerima manfaat.
3. **Dokumentasi**: mengumpulkan dokumen pendukung seperti peraturan desa, laporan keuangan, dan dokumentasi program kegiatan.

Teknik analisis data mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber dan teknik. Data hasil wawancara diverifikasi dengan dokumen pendukung serta hasil observasi lapangan guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum Desa Sindangsari

Desa Sindangsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah 312 hektar dan kondisi geografis sebagian besar berupa perbukitan dan sawah. Jumlah penduduknya mencapai 5.317 jiwa, dengan mata pencarian utama di sektor pertanian dan buruh tani. Desa ini tergolong desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sarana pendidikan, keterisolasian antardusun, serta minimnya lapangan kerja formal.

3.2 Karakteristik informan

Informan yang diwawancarai memiliki latar belakang beragam dan peran signifikan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Peneliti mengutamakan triangulasi sumber dengan menggabungkan pandangan pemerintah desa, pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat (Tabel 2).

Tabel 2. Identitas informan penelitian

No	Inisial informan	Jabatan/status sosial	Keterangan
1	KDS	Kepala Desa	Pengambil kebijakan
2	KSD	Kasi Pemerintahan	Perencana kegiatan
3	SEK	Sekretaris Desa	Administratif
4	BMD	Ketua BUMDes	Pelaksana usaha
5	TM1	Tokoh Masyarakat 1	Tokoh RT
6	TM2	Tokoh Masyarakat 2	Tokoh RW
7	WRT	Warga Penerima Manfaat	Program padat karya
8	WKM	Warga Miskin	Penerima bantuan
9	WPR	Warga Perempuan	Pelatihan menjahit
10	WKU	Warga Usia Lanjut	Bantuan sembako

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

3.3 Implementasi kebijakan alokasi Dana Desa

Pemerintah Desa Sindangsari mengalokasikan Dana Desa berdasarkan prioritas nasional dan kebutuhan lokal, dengan mempertimbangkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Alokasi dilakukan secara terencana dan disesuaikan dengan pedoman Peraturan Menteri Desa PDTT dan Peraturan Bupati Bandung (Tabel 3).

Tabel 3. Alokasi Dana Desa tahun 2023

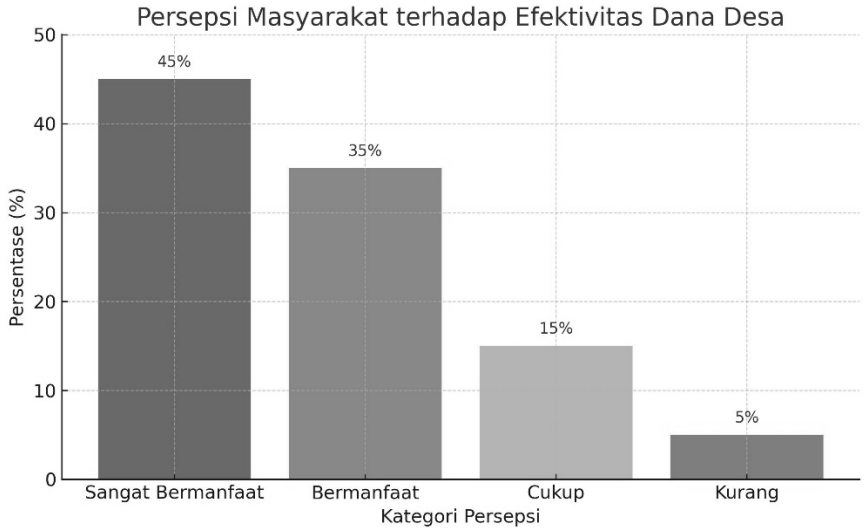
No	Bidang pemanfaatan	Persentase (%)	Realisasi dana (Rp)
1	Pembangunan infrastruktur	35	441.000.000
2	Pemberdayaan ekonomi dan pelatihan	25	315.000.000
3	Penanggulangan kemiskinan dan stunting	30	378.000.000
4	Administrasi dan operasional desa	10	126.000.000
	Total Dana Desa 2023	**100**	**1.260.000.000**

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Kegiatan prioritas mencakup pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1.200 meter, pembangunan posyandu dan saluran irigasi, pelatihan menjahit dan pertukangan, serta program padat karya tunai (PKT) dan pengembangan usaha BUMDes. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

3.4 Efektivitas Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan

Penilaian efektivitas dilakukan dengan mengkaji dampak program terhadap pengurangan angka kemiskinan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi, Dana Desa telah mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga serta memperluas akses warga terhadap pelayanan dasar. Persepsi masyarakat terhadap efektivitas Dana Desa ditunjukkan pada Gambar 1: 45% responden menyatakan "Sangat Bermanfaat", 35% "Bermanfaat", 15% "Cukup", dan 5% "Kurang".



Gambar 1. Persepsi masyarakat terhadap efektivitas Dana Desa

Dampak langsung Dana Desa meliputi:

- Penyerapan tenaga kerja lokal dalam program padat karya.
- Peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan produktif.
- Penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 17 unit.
- Penyediaan sarana air bersih di dua dusun.

Namun, efektivitas masih terkendala oleh:

- Kurangnya pendampingan lanjutan bagi peserta pelatihan.
- Ketergantungan terhadap dana pemerintah.
- Keterlambatan pencairan yang mengganggu jadwal kegiatan.

3.5 Evaluasi tata kelola Dana Desa

Dari segi tata kelola, transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama pemerintah desa. Peneliti menemukan bahwa pelaporan penggunaan Dana Desa telah dilakukan melalui papan informasi, laporan berkala ke kecamatan, dan forum musyawarah desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala, yaitu:

- Akses informasi terbatas di dusun terpencil.
- Partisipasi perempuan dalam musyawarah belum optimal.
- Pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal.

Kinerja pemerintah desa dapat ditingkatkan dengan membangun sistem pengaduan digital, penguatan kapasitas perangkat desa, dan pelibatan aktif kelompok rentan dalam proses perencanaan. Temuan ini sejalan dengan literatur tentang pentingnya tata kelola berbasis partisipasi dan evaluasi berkelanjutan dalam konteks desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2021; Wulandari & Yuliana, 2023).

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian terkait penerapan kebijakan alokasi Dana Desa di Desa Sindangsari, dapat disimpulkan sejumlah poin penting sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sindangsari telah mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
2. Implementasi kegiatan Dana Desa terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, serta pengurangan rumah tidak layak huni.
3. Persepsi masyarakat terhadap efektivitas Dana Desa cukup tinggi, dengan mayoritas responden menyatakan bahwa dana tersebut bermanfaat atau sangat bermanfaat.
4. Kendala efektivitas meliputi keterlambatan pencairan dana, minimnya pelatihan lanjutan, serta masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dalam perencanaan.
5. Tata kelola Dana Desa menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun masih memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan generasi muda.

4.2 Saran

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan Dana Desa dengan memperkuat mekanisme musyawarah dan menjangkau kelompok rentan.
2. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dalam bidang manajemen proyek, keuangan desa, dan sistem pelaporan berbasis teknologi.
3. Program pelatihan dan pemberdayaan sebaiknya disertai pendampingan pasca-program agar hasilnya berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan mempercepat pencairan Dana Desa agar tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5. Penelitian lanjutan disarankan mengevaluasi dampak jangka panjang Dana Desa terhadap indikator kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Dengan implementasi yang tepat dan tata kelola yang baik, Dana Desa berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andriani, R., & Suryadi, D. (2023). Strategi tata kelola dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 11*(2), 112–124. https://doi.org/10.33005/jakp.v11i2.325

Fadillah, I., & Rachman, F. (2022). Analisis efektivitas dana desa terhadap penurunan kemiskinan: Studi pada Kecamatan Majalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pemerintahan, 5*(1), 45–59. https://doi.org/10.22146/jiep.5.1.2022.221

Hidayat, A., & Nuraeni, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa: Studi kasus Desa Mekarsari. *Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, *9*(1), 77–89. https://doi.org/10.25105/jisan.v9i1.1234

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik: Edisi revisi*. Yogyakarta: ANDI.

Pebrian, P., & Sulastri, I. (2024). Evaluasi implementasi anggaran dana desa dalam menunjang kemandirian ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis, 8*(1), 55–67.

Ramadhan, A., & Setiawan, R. (2023). Inovasi digital pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, *7*(2), 88–101.

Sulaeman, T., & Maulida, N. (2022). Analisis kinerja keuangan desa pasca penyaluran dana desa. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis, 6*(3), 145–158.

Syahrul, M., & Fitria, D. (2021). Penerapan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis, 5*(2), 93–105.

Wulandari, R., & Yuliana, S. (2023). Desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat: Studi empiris dana desa. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Daerah*, *4*(1), 20–34. https://doi.org/10.31219/osf.io/9akvy